

BAB IV

E-GOVERNMENT KOTA DENPASAR

4.1. Pemeringkatan e-Government Indonesia

Pemerintah Pusat dalam usahanya mendorong Pemerintah Daerah memberikan layanan yang lebih baik kepada warganya melalui evaluasi tahunan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) pelaksanaan e-Government Pemerintah Daerah. PeGI diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. PeGI memiliki tiga tujuan dengan strategi sebagai berikut.

Tujuan 1

Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.

- PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
- Diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

Tujuan 2

Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.

- PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah.
- Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang memberikan kontribusi bagi suksesnya pengembangan dan implementasi e-government, bukan hanya aspek aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja
- Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi
- Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi

Tujuan 3

Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

- PeGI meliputi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional.
- Dapat menggambarkan kondisi dari sisi kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.

Strategi Penerapan PeGI

1. Peserta pemeringkatan dikelompokkan sesuai dengan jenis lembaga, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kementerian, dan lembaga non kementerian.
2. Asesmen menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak.
3. Metoda dan hasil asesmen dipublikasikan. Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuan (*trend*).

Asesmen PeGI meliputi lima aspek yaitu:

1. Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Infrastruktur
4. Aplikasi
5. Perencanaan

Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang.

Metodologi PeGI

1. Penjelasan proses kepada peserta
2. Pengisian kuisioner oleh peserta
3. Pemeriksaan kuisioner oleh asesor
4. Klarifikasi oleh asesor bila diperlukan
5. Asesmen dan pemberian *rating* per peserta oleh asesor

6. Normalisasi oleh asesor
7. Sidang asesor
8. Publikasi

Tabel 4.1. PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2014

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	DKI Jakarta	3.04	3.13	3.14	3.30	2.80	3.08	Baik
2	Jawa Barat	2.88	3.20	2.95	3.13	2.87	3.01	Baik
3	Jawa Timur	3.08	3.13	2.90	2.73	2.60	2.89	Baik
4	D.I. Yogyakarta	2.79	2.93	2.95	2.80	2.93	2.88	Baik
5	Jawa Tengah	2.67	2.67	2.76	2.87	2.67	2.73	Baik
6	Gorontalo	2.67	2.80	2.62	2.57	2.60	2.65	Baik
7	Bali	2.63	2.53	2.52	2.80	2.73	2.64	Baik
8	Sumatera Utara	2.67	2.67	2.38	2.53	2.80	2.61	Baik
9	Aceh	2.33	2.67	2.67	2.60	2.53	2.56	Baik
10	Kalimantan Timur	2.71	2.53	2.10	1.93	1.93	2.24	Kurang
11	Bangka Belitung	2.13	2.60	2.05	2.67	1.80	2.23	Kurang
12	Riau	2.21	2.53	2.14	2.17	1.93	2.20	Kurang
13	Nusa Tenggara Barat	1.96	2.20	2.24	2.30	2.00	2.14	Kurang
14	Sumatera Selatan	1.71	2.13	2.19	2.43	1.80	2.05	Kurang
15	Kalimantan Barat	1.50	2.20	2.14	2.60	1.80	2.05	Kurang
16	Sumatera Barat	2.04	2.13	1.90	2.30	1.67	2.01	Kurang
17	Kalimantan Tengah	2.42	1.93	1.62	2.20	1.67	1.97	Kurang
18	Lampung	1.92	2.00	1.95	1.97	1.60	1.89	Kurang
19	Sulawesi Barat	1.54	1.93	1.71	2.00	1.53	1.74	Kurang
20	Sulawesi Tengah	2.08	1.80	1.52	1.60	1.53	1.71	Kurang
21	Papua	1.63	1.73	1.67	1.90	1.53	1.69	Kurang
22	Nusa Tenggara Timur	1.42	1.93	1.29	2.00	1.33	1.59	Kurang
RATA-RATA		2.27	2.43	2.25	2.42	2.12	2.30	Kurang

Tabel 4.2. PeGI Tingkat Kabupaten – Kota Provinsi Bali Tahun 2014

Sistem Penilaian PeGI

Adapun pemberian peringkat (*rating*) pada para peserta yang dilakukan untuk masing masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- $3,60 \leq \text{SANGAT BAIK} \leq 4,00$
- $2,60 \leq \text{BAIK} < 3,60$
- $1,60 \leq \text{KURANG} < 2,60$
- $1,00 \leq \text{SANGAT KURANG} < 1,60$

Hasil pemeringkatan untuk tahun 2014, yang menempati posisi pertama tingkat provinsi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peringkat lengkap ditampilkan oleh Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kabupaten Jembrana	2.67	2.80	2.76	2.87	2.80	2.78	Baik
2	Kabupaten Badung	2.33	2.53	2.57	2.50	2.87	2.56	Baik
3	Kota Denpasar	2.29	2.13	2.14	2.13	2.53	2.25	Kurang
4	Kabupaten Karangasem	2.25	2.07	1.81	2.17	1.80	2.02	Kurang
5	Kabupaten Klungkung	1.50	2.40	2.10	2.10	1.60	1.94	Kurang
6	Kabupaten Buleleng	1.88	2.13	1.81	1.70	1.60	1.82	Kurang
7	Kabupaten Tabanan	1.25	1.53	1.62	1.83	1.60	1.57	Kurang
RATA-RATA		2.02	2.23	2.12	2.19	2.11	2.13	Kurang

4.2. Kondisi Eksisting E-Government Kota Denpasar

Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan *e-government* sejak tahun 2005. Sejak saat itu dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK melalui pembuatan *blueprint*, aplikasi dan *website*, pembangunan infrastruktur, hingga pendidikan dan pelatihan SDM dalam bidang TIK. Pembangunan jaringan infrastruktur dan *website* dengan domain <http://denpasar.go.id> dimulai yang kemudian berubah menjadi <http://denpasarkota.go.id> sesuai Peraturan Menteri Kominfo. Dari media informasi tersebut, inovasi pelayanan publik Kota Denpasar berkembang di setiap SKPD. Hal ini didukung oleh tersedianya akses jaringan informasi komunikasi sampai di tingkat kecamatan. Pembangunan *e-government* pada Pemerintah Kota Denpasar mengacu pada Inpres No 3 tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Kota Denpasar dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar No. 35 Tahun 2014 memperkuat pengembangan e-Government Kota Denpasar, dimana Perwali ini mengatur Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pemeringkatan lain selain PeGI, Pemkot Denpasar menjadi salah satu 30 nominator IGA (Inovative Government Award) dari 108 Pemerintah Daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 (kemendagri.go.id , 2012). Penghargaan peringkat III Smart Governance oleh Warta Ekonomi pada tahun 2011 yang menyisihkan 59

Pemerintah Daerah (inilah.com , 2011). Termasuk kedalam 30 Pemda yang menerima penghargaan ICT Pura dari 159 Pemda yang dinilai oleh Kominfo tahun 2011.

Infrastruktur TIK yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini sudah menghubungkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke jaringan Intranet maupun Internet dan menjadi tulang punggung dalam setiap aktivitas komunikasi data dan informasi melalui aplikasi-aplikasi baik yang dapat diakses melalui internet maupun hanya intranet. Infrastruktur jaringan di Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 22 titik/SKPD menggunakan media *wireless* 5,8 Ghz, 10 titik/SKPD dan *backbone* menggunakan media *fiber optic*. Sedangkan untuk penyediaan *bandwidth* Internet mulai tahun 2014 sebesar 80 Mbps yang dibagi merata ke seluruh titik/SKPD. Pada infrastruktur jaringan tersebut, saat ini telah berjalan berbagai aplikasi pelayanan serta aplikasi administrasi dan manajemen. Aplikasi pelayanan meliputi antara lain:

- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
- Perijinan Online,
- Bursa Kerja Online,
- Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (Pro Denpasar),
- Denpasar *E-Commerce*,
- *E-Procurement*,
- Jendela Denpasar,
- Radio streaming
- TV streaming
- Subdomain dan Website Pemerintah Kota Denpasar.

Untuk aplikasi administrasi dan perkantoran meliputi:

- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD),
- Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA),
- Sistem Kinerja Pegawai, dan Sistem Kepegawaian.

Aplikasi yang menyentuh langsung pelayanan dasar antara lain Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pro Denpasar. SIAK terdiri dari aplikasi layanan pembuatan KTP, Akta kelahiran, dan Kartu Keluarga. Sedangkan Pro Denpasar merupakan aplikasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Aplikasi SIAK yang diakses oleh operator kecamatan bersifat *client server* dengan *platform* website dimana

server berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Sedangkan untuk pengaduan di tingkat kecamatan, masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan lewat internet yang nantinya akan ditanggapi oleh kecamatan yang bersangkutan. Untuk itu pengelolaan infrastruktur menjadi sangat vital fungsinya karena merupakan tulang punggung jalannya aplikasi SIAK dan Pro Denpasar.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-government* Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2010-2015 terdapat hasil survey untuk mengetahui kondisi tentang kesiapan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan *e-government*. Survey yang dilakukan melibatkan 84 perusahaan sebagai responden, 386 orang sebagai responden masyarakat dan 44 instansi Pemerintah Kota Denpasar. Dari hasil survey yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan swasta telah siap dalam implementasi *e-government*, hanya saja perlu peningkatan kesiapan dari sisi Pemerintah Kota Denpasar. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tertuang visi dan misi untuk tahun 2010 – 2015.

4.2.1 Infrastruktur Aplikasi Pemerintah Kota Denpasar

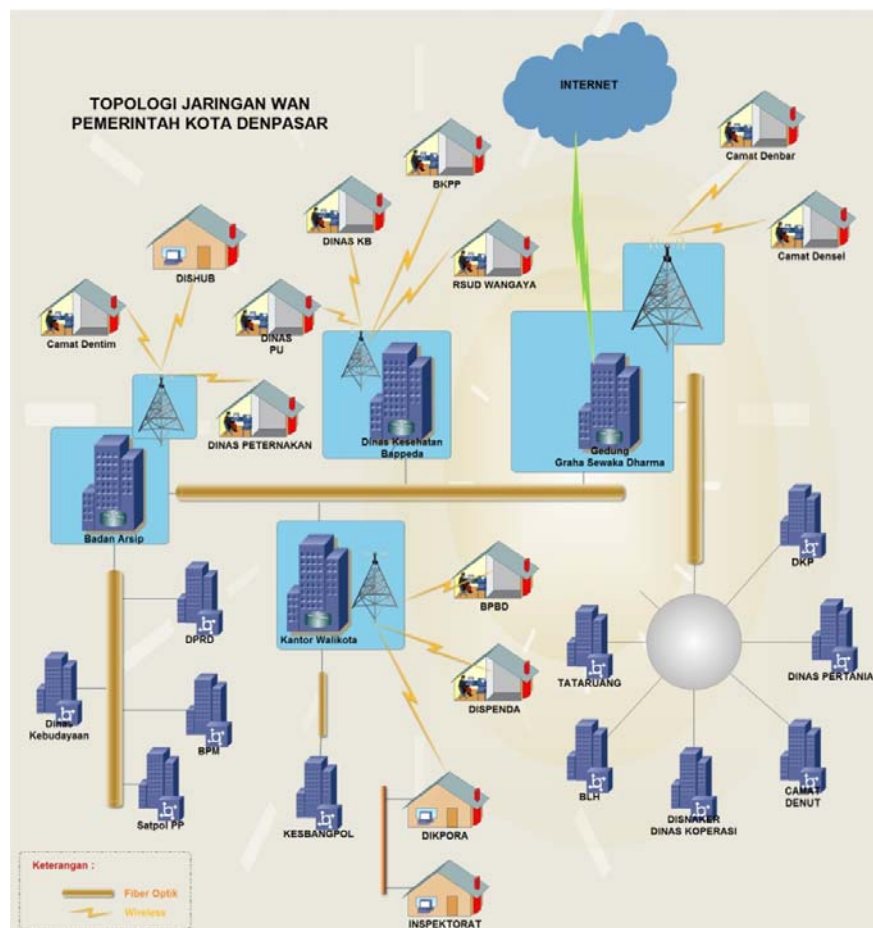
Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar telah menggunakan aplikasi berbasis *client server* untuk keuangan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan aset yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Barang). Sementara itu beberapa SKPD telah menggunakan aplikasi khusus yang berjalan di jaringan untuk menunjang aktifitasnya seperti yang tampak pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Aplikasi di Pemerintah Kota Denpasar (Diskominfo, 2015)

No	Aplikasi	Instansi Pengelola	Pengguna Informasi
1	Perijinan Online	Badan Perijinan	Masyarakat
2	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Internal Dinas
3	Bursa Kerja Online	Dinas Tenaga Kerja	Masyarakat
4	Pro Denpasar	Dinas Kominfo	Masyarakat
5	Denpasar Trading/e-Commerce	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Masyarakat
6	Sistem Informasi Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Internal Dinas
7	Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Internal Dinas
8	Social Media	Dinas Kominfo	Masyarakat
9	Jendela Denpasar	Dinas Kominfo	Masyarakat
10	Subdomain Website	Seluruh Instansi	Masyarakat
11	LPSE	Unit Layanan Pengadaan	Masyarakat

4.2.2 Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Denpasar

Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Denpasar sudah terhubung ke jaringan *wide area network* (WAN), dengan total 40 titik yang tersebar dengan *network operation centre* (NOC) berada di Gedung Graha Sewaka Dharma. Jaringan WAN Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 4 zona yang berfungsi sebagai jaringan *backbone* SKPD terdekat. SKPD yang mejadi *backbone* yaitu Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi berlokasi di Jl Surapati No 4 Denpasar, Kantor Walikota berlokasi di Jl Gajah Mada No 1 Denpasar, Bappeda berlokasi di Jl Maruti No 8 Denpasar dan Graha Sewaka Dharma berlokasi di Jl Majapahit No 1. Semua SKPD *backbone* terhubung dengan media *fiber optic*.



Gambar 4.1. Topologi WAN Pemerintah Kota Denpasar (Diskominfo)

Media transmisi yang digunakan adalah *wireless* dan *fiber optic* sebagai jaringan *backbone*. Sebagai perangkat *routing*, digunakan produk *router* dari mikrotik. Infrastruktur yang tersedia ini digunakan untuk melakukan akses internet dan akses aplikasi secara intranet.

Bandwidth internet untuk tahun 2015 sebesar 80 Mbps dengan perbandingan 1:1 yang dibagi merata ke seluruh SKPD dengan alokasi rata-rata 3-5 Mbps. *Bandwidth upload* digunakan untuk melayani *hosting* beberapa *server website* yang untuk pelayanan publik, seperti layanan perijinan, bursa kerja, KK Online dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah PC SKPD yang terhubung ke jaringan Internet mencapai ± 1500 user. Topologi jaringan WAN Pemerintah Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.3. Dinas Kominfo Kota Denpasar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang mengacu pada Perda No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar secara optimal telah berusaha menyeimbangkan sistem TIK dengan kondisi terkini.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 adalah:

“Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan”.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efesiensi dan efektifitas kerja.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Tujuan Diskominfo Kota Denpasar

Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan, sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Tujuan yang telah dirumuskan adalah:

“Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu serta terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi”.

Sasaran Diskominfo Kota Denpasar

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun atau lebih.

Sasaran untuk jangka waktu lima tahun adalah : Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan, Program, Kegiatan Diskominfo Kota Denpasar

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar masing–masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam pelaksanaan pembangunan pos dan telematika mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD 2013 diantaranya:

1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
4. Kerjasama informasi dengan mass media
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 1 (satu) Kepala UPTD. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang dibantu oleh masing – masing 3 (tiga) orang Kepala Seksi. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Kasub Bag. Umum
 2. Kasub Bag. Kepegawaian
 3. Kasub Bag. Keuangan

- c. Kepala Bidang Bina Program
 - 1. Kasi Perencanaan
 - 2. Kasi Data dan Informasi
 - 3. Kasi Evaluasi dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Piranti Lunak
 - 1. Kasi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak
 - 2. Kasi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak
 - 3. Kasi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak
- e. Kepala Bidang Piranti Keras dan Jaringan
 - 1. Kasi Analisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan
 - 2. Kasi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan
 - 3. Kasi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan
- f. Kepala Bidang Pos dan Telematika
 - 1. Kasi Pos dan Komunikasi
 - 2. Kasi Publikasi Media dan Telematika
 - 3. Kasi Pengawasan dan Penyuluhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 1. Kasub Bag. Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kota Denpasar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika,

- Pemberian rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya pada bidang komunikasi dan informatika.
- Tugas lainnya dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti memberikan pelayanan umum serta rekomendasi usaha penyewaan VCD/DVD di Kota Denpasar.

Adapun Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 sebagai berikut.

Tugas Kepala Dinas

- a. Menetapkan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang ada;
- c. Memberikan pelayanan perijinan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- g. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Sekretaris Diskominfo

- a. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian;

- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menyusun perencanaan Umum Dinas;
- g. Mengelola data dan informasi Dinas;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan Sekretariat;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Bidang Piranti Lunak mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kegiatan bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Lunak.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Lunak.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pengelolaan urusan analisa dan perancangan piranti lunak.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan dan implementasi piranti lunak
- h. melaksanakan pengelolaan urusan sosialisasi, pelatihan dan pemeliharaan piranti lunak.
- i. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Piranti Keras dan Jaringan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di Bidang Piranti Keras dan jaringan.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pengelolaan urusan analisa perancangan piranti keras dan jaringan.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan pelaksana piranti keras dan jaringan.
- h. melaksanakan pengelolaan urusan sosialisasi pemeliharaan piranti keras dan jaringan.
- i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pos dan Telematika mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Pos dan Telematika.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Pos dan Telematika.
- c. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan. memeriksa hasil kerja bawahan.
- e. memberikan rekomendasi pengurusan ijin jasa titipan lokal, cabang, agen dan intra kota.

- f. melaksanakan pengawasan ijin untuk penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung.
- g. melaksanakan pengawasan pengujian alat perangkat pos dan telekomunikasi.
- h. memantau pelanggaran ijin atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat pos dan telekomunikasi.
- i. memantau dan membina pengguna ijin spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi lokal dan radio lokal mengacu pada alokasi spektrum frekuensi nasional.
- j. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan filateli.
- k. memberikan usulan rencana perumusan standar postel.
- l. melakukan inventarisasi dan pemantauan kegiatan jasa pelayanan telekomunikasi dan pelanggan telepon seluler.
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan tarif jasa telepon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. menyusun program pembinaan usaha jasa titipan.
- o. melakukan inventarisasi dan analisis serta evaluasi kinerja usaha titipan.
- p. melaksanakan publikasi dan komunikasi melalui media.
- q. melaksanakan pengawasan terhadap media.
- r. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.3.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai/karyawan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sangatlah minim serta perlu mendapatkan pendidikan ataupun latihan guna membentuk Sumber Daya Manusia yang profesionalisme dalam menangani tugas-tugas atau kegiatan operasional. Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang berlatarbelakang pendidikan Informasi Teknologi (IT).